



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. LAMPUNG
BARAT

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini
Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

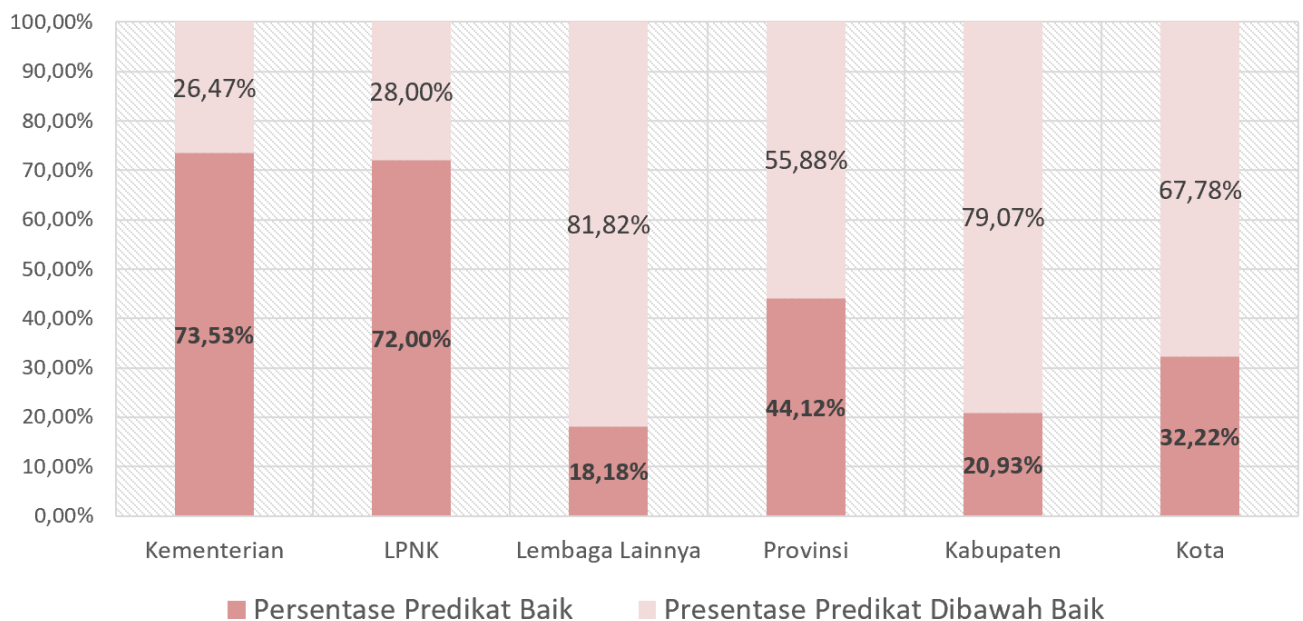
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

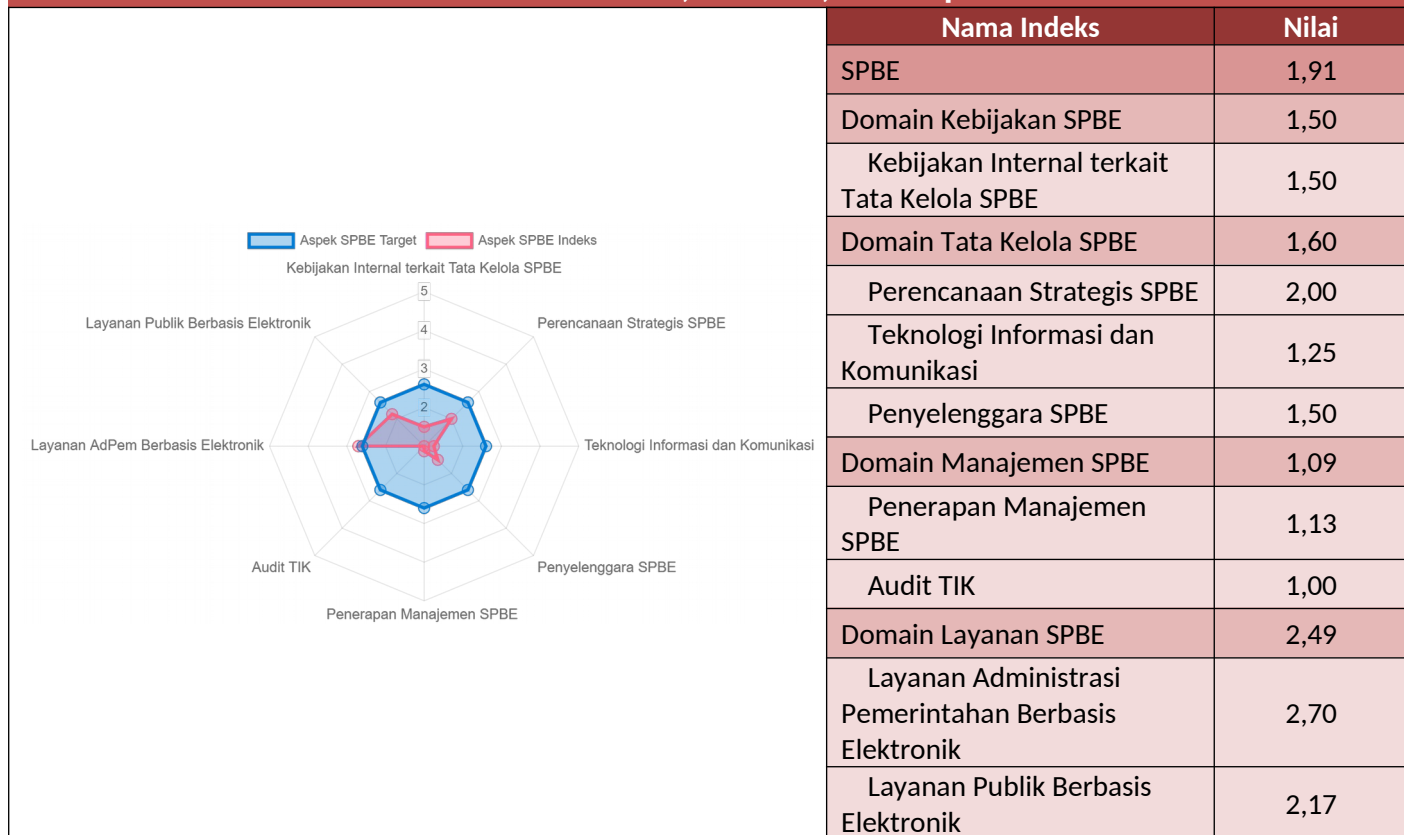
Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola yang telah dipenuhi oleh Pemkab Lampung Barat adalah dengan adanya kebijakan internal arsitektur, peta rencana SPBE, dan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi.

- **Kekuatan**

Pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat dilihat bahwa belum ada kekuatan yang signifikan pada aspek ini.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, meskipun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki Perbup No.40 Tahun 2020 tentang Penerapan SPBE, namun belum mencakup seluruh domain SPBE yaitu arsitektur data dan informasi dan arsitektur keamanan SPBE. Peta rencana belum mengatur tentang audit TIK dan keamanan yang lebih rinci. Pembangunan aplikasi juga belum mengikuti siklus pembangunan aplikasi. Pemkab Lampung Barat belum memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra Instansi, internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi, kebijakan internal manajemen keamanan informasi, dan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Lampung Barat yaitu Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE.

- **Kekuatan**

Pada aspek perencanaan strategis SPBE di Kab Lampung Barat dapat dilihat bahwa belum adanya kekuatan yang signifikan pada aspek ini

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, kelemahan pada aspek tata kelola yaitu belum diterapkan Inovasi Proses Bisnis

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hanya menerapkan layanan jaringan intra pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Kekuatan
Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, belum ada keunggulan signifikan yang diterapkan
- Kelemahan
Pemekab Lampung Barat belum menerapkan Pembangunan Aplikasi, layanan pusat data, dan sistem penghubung layanan instansi. Instansi dan OPD di Kabupaten Lampung Barat telah terhubung pada jaringan intra, namun topologi jaringan dan dokumentasi mengenai penerapan jaringan intra perlu ditingkatkan

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan aspek penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lampung Barat yang sudah dipenuhi adalah pelaksanaan tim koordinasi SPBE

- Kekuatan
Pada aspek penyelenggaraan SPBE, belum ada keunggulan signifikan yang diterapkan
- Kelemahan
Kabupaten Lampung Barat juga belum menerapkan kolaborasi penerapan SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat baru menerapkan kompetensi sumber daya manusia

- Kekuatan
Pada aspek penerapan manajemen SPBE, belum ada keunggulan signifikan yang diterapkan
- Kelemahan
Kelemahan penerapan aspek Manajemen SPBE pada Kabupaten Lampung Barat terdapat pada seluruh indikator pada aspek Penerapan Manajemen SPBE. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Penerapan Manajemen aset TIK telah diterapkan di Kabupaten Lampung Barat, namun belum mengacu pada pedoman yang berlaku dengan mengikuti serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemkab Lampung Barat

- Kekuatan
Pada aspek penerapan Audit TIK, belum ada keunggulan signifikan yang diterapkan
- Kelemahan
Kelemahan pada aspek Audit TIK terdapat pada semua pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE yang belum diterapkan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sudah terpenuhi pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

- Kekuatan
Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat terlihat beberapa kekuatan dengan penerapan layanan perencanaan, dan layanan pengadaan barang dan jasa,
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan layanan kepegawaian, pengawasan internal pemerintah, dan layanan kinerja pegawai.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan publik berbasis elektronik yang sudah dipenuhi yaitu

layanan pengaduan pelayanan publik, layanan dokumentasi dan informasi hukum, serta layanan publik sektor 1,2,dan 3

- Kekuatan

Pada aspek layanan publik berbasis elektronik, belum ada kekuatan yang signifikan

- Kelemahan

Namun disisi lain, pemerintah kabupaten Lampung Barat belum menerapkan layanan data terbuka. Selain itu layanan pengaduan publik belum menggunakan aplikasi SP4N LAPOR, dan penggunaan aplikasi JDIH yang masih memiliki tingkat kapabilisan fungsi teknis pada level informasi

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Lampung Barat. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Lampung Barat, sudah dapat menggambarkan predikat Cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada perencanaan/penganggaran, pengadaan barang dan jasa secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Lampung Barat menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Kabupaten Lampung Barat masih terdapat beberapa kelemahan. Pada kebijakan internal arsitektur SPBE, belum mencakup seluruh domain SPBE. Pada perencanaan strategi SPBE, meskipun Kabupaten Lampung Barat telah memiliki RINTIK, namun hanya mencakup Data dan Informasi, Domain Aplikasi, dan Domain. Demikian pula pada peta rencana SPBE yang hanya mencakup tata kelola dan infrastruktur SPBE. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menjadi kelemahan dimana belum dilakukan penerapan pembangunan aplikasi, layanan pusat data, dan sistem penghubung layanan pusat. Aspek Pelaksanaan audit TIK juga menjadi kelemahan pada penerapan SPBE di Kabupaten Lampung Barat. Kelemahan juga dapat dilihat pada seluruh penerapan pada aspek Manajemen SPBE.

Aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE sudah ditetapkan, namun belum mengatur beberapa kebijakan internal seperti layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan Instansi, manajemen keamanan informasi, dan kebijakan internal audit. Pada Aspek Tata Kelola, Kabupaten Lampung Barat perlu menetapkan Proses Bisnis SPBE. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih perlu ditingkatkan, khususnya pada pembangunan aplikasi, layanan pusat data, dan sistem penghubung layanan instansi. Pada aspek penyelenggaraan SPBE, Kabupaten Lampung Barat telah memiliki tim penyelenggara SPBE namun perlu peningkatan dalam kolaborasi penerapan SPBE. Aspek Manajemen dan Audit perlu menjadi perhatian karena penerapannya masih rendah. Sedangkan penerapan pada aspek layanan sudah menerapkan beberapa aplikasi yang direkomendasikan oleh kementerian PAN-RB maupun Kemendagri, namun masih ada beberapa layanan yang perlu ditingkatkan kapabilitas fungsi teknisnya seperti layanan pengawasan internal dan layanan kinerja pegawai yang masih dilakukan secara manual sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2